

**Implementasi *Collaborative Governance* dalam Program Bangga
Kencana sebagai Upaya Percepatan Penurunan Angka Stunting di
Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas Akademik
dan Memenuhi Syarat Pencapaian Gelar Sarjana Strata-1
Program Studi Administrasi Negara



Oleh:

NADILA RIZKI TRI RACHMAWATI

NBI 1112000060

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
SURABAYA**

2024

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| DAFTAR ISI | i |
| DAFTAR TABEL | ii |
| DAFTAR GAMBAR | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 6 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 6 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 6 |
| 1.4.1 Manfaat Teoritis | 6 |
| 1.4.2 Manfaat Praktis | 6 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 7 |
| 2.1 Penelitian Terdahulu | 7 |
| 2.2 Landasan Teori..... | 24 |
| 2.2.1 Implementasi | 24 |
| 2.2.2 Program | 26 |
| 2.2.3 Collaborative Governance..... | 26 |
| 2.3 Kerangka Konseptual | 32 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 33 |
| 3.1 Jenis Penelitian..... | 33 |
| 3.2 Fokus Penelitian | 33 |
| 3.3 Lokasi Penelitian..... | 35 |
| 3.4 Sumber Data..... | 35 |
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data | 36 |
| 3.6 Teknik Analisis Data..... | 37 |
| DAFTAR PUSTAKA | 39 |
| LAMPIRAN | 39 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--------------------------------------|---|
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu | 7 |
|--------------------------------------|---|

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 2.1 Model <i>Collaborative Governance</i> | 27 |
| Gambar 2.2 Kerangka Konseptual | 32 |
| Gambar 3.1 Model Analisis Data Miles dan Huberman | 37 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, memiliki tugas untuk melaksanakan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Akhir tahun 2019 BKKBN mengemas dan memperkenalkan istilah Program KKBPK menjadi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga berencana atau yang disingkat menjadi Bangga Kencana alasan dilakukan perubahan nama karena pelafalannya yang sulit diucapkan. Peletakan kata Pembangunan Keluarga di depan menunjukkan bahwa BKKBN merupakan lembaga yang ingin memberikan manfaat kepada seluruh keluarga Indonesia (Utami & Alawiya, 2021).

Program Bangga Kencana memiliki fokus tujuan dalam menciptakan keluarga yang berkualitas. Salah satu fokus dari program Bangga Kencana, yaitu penurunan stunting yang juga menjadi program strategis nasional yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia (RI). Di mana hal ini juga menjadi salah satu upaya yang berkaitan dengan *Collaborative Governance* (Saputra & Yuliani, 2021).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Jenifer Sokoy et al., n.d.) menjelaskan Implementasi Program Bangga Kencana di Kabupaten Jayapura oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sudah berjalan dengan sangat baik sesuai dengan indikator yang ada, hanya saja masih ada masalah di indikator komunikasi yaitu pada kejelasan informasi. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura yakni meningkatkan kualitas dan jumlah sumber daya manusia, mengalokasikan dana guna prasarana dan sarana yang terbilang kurang, mengajukan anggaran menunjang keberhasilan program, dan melakukan penyuluhan.

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten yang terbilang cukup tinggi untuk persoalan stunting di Provinsi Jawa Timur. Di mana pada tahun 2020 angka stunting di Kabupaten Sidoarjo menyentuh angka 8,24 persen atau 6.207 anak, meskipun terjadi penurunan pada tahun 2021 yakni menjadi 7,9 persen atau 5.239 anak dari 66.353 yang diperiksa bukan berarti permasalahan ini selesai begitu saja. Perlu adanya penanganan yang tepat dan juga kontribusi dari pihak-pihak yang berkaitan baik itu pemerintah, swasta, ataupun masyarakat setempat (Radarsidoarjo.co.id, 2022).

Maraknya kasus stunting di Kabupaten Sidoarjo bukan tanpa alasan. Nyatanya banyak sekali faktor yang menyebabkan Kabupaten Sidoarjo memiliki angka stunting yang bisa dikatakan lumayan tinggi daripada daerah lain di Indonesia. Saat ini Pemkab Sidoarjo tengah

berupaya atau sedang gencar-gencarnya meminta partisipasi dari masyarakat untuk bisa menurunkan angka stunting di Kabupaten Sidoarjo.

Beralih pada pernyataan sebelumnya, bahwasanya terdapat beragam penyebab dari kasus stunting yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Pertama, terkait dengan kurangnya gizi atau nutrisi yang dipenuhi oleh sang ibu baik dari sebelum melahirkan sampai dengan proses melahirkan itu sendiri. Kedua, terkait dengan pemberian ASI eksklusif. Apabila ibu tidak memberikan ASI eksklusif hal tersebut dapat menjadi faktor penyebab stunting pada anak (Pujiastuti et al., 2022).

Kemudian faktor yang ketiga adalah terkait dengan tidak tercukupinya makanan yang sehat dan juga bergizi bagi anak-anak terlebih di saat mereka sedang di masa-masa pertumbuhan. Lalu yang keempat adalah terkait dengan kesehatan lingkungan. Di Kabupaten Sidoarjo saat ini dinilai masih banyak terjadi BAB atau buang air besar yang masih sembarangan. Sehingga angka ODF atau *Open Defecation Free* atau bebas buang air besar sembarangan di Kabupaten Sidoarjo hanya sebesar 57 persen saja.

Berdasarkan riset Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa 60 persen penyebab stunting adalah minimnya air bersih dan sanitasi yang buruk, dan 40 persen nya diakibatkan oleh gizi buruk. Sidoarjo punya catatan menarik terkait kasus stunting, bukan karena warga kurang makanan bergizi tetapi faktor utamanya adalah kurangnya air bersih untuk dikonsumsi warga.

Lebih lanjut, Ahmad Mudhlor dalam (Liputan6.com, 2022) menyampaikan bahwa kasus stunting pada anak di Sidoarjo banyak disebabkan oleh tingginya kebiasaan konsumsi air tanah atau air sumur dengan kandungan logam berat timbal (Pb) lebih dari standar yang diperbolehkan. Hal ini didasari pengamanannya bahwa masyarakat Kabupaten Sidoarjo masih mengkonsumsi air sumur yang tidak layak dengan melebihi standar yang telah ditetapkan.

Tentu saja sebagai permasalahan yang tak kunjung usai, kasus stunting terus diupayakan oleh seluruh daerah untuk bisa dientaskan secara bersama-sama. Tak terkecuali dari Kabupaten Sidoarjo di mana sudah banyak program ataupun penyuluhan yang dilakukan demi menekan angka kasus stunting yang berada di Kabupaten Sidoarjo.

Kemudian, melansir dari (Wartagres, 2023) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkomitmen untuk fokus pada upaya penanganan stunting. Hal ini terlihat dengan adanya program Konsolidasi Bangsa Kencana dan Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting. Program ini memiliki tujuan untuk lebih perhatian pada perkembangan dan pertumbuhan anak-anak, agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat.

Lebih lanjut, menurut data DP3AKB tercatat sebanyak 4812 tim penurunan stunting di Kabupaten Sidoarjo yang terdiri atas Bidan, Kader PKK, dan Kader KB. Kemudian, diharapkan adanya penurunan angka stunting hingga 14 persen di tahun 2024 bisa tercapai. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga akan terus meningkatkan sinergi dengan pemerintah pusat dan pihak-pihak terkait lainnya agar bisa mendukung program ini. (TV One News, 2023)

Adapun pihak-pihak yang tergabung dalam program Bangga Kencana itu sendiri terdiri dari BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional), lalu ada dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, kemudian pihak lainnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo. Bersama instansi terkait, program Bangga Kencana diperkuat dengan kolaborasi dari PT. Angkasa Pura I Surabaya. Adapun media yang meliput ikut memberikan kontribusi dalam publikasi dan dokumentasi oleh beberapa media seperti Wartagres, Tv One News, Radar Sidoarjo, dan Diskominfo Jawa Timur. Terakhir, pihak yang terlibat tentu masyarakat dari Kabupaten Sidoarjo (TV One News, 2023).

Selain itu juga program kolaborasi yang dilakukan yang berkenaan dengan program Bangga Kencana juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan programnya yaitu adanya pendirian balai penyuluhan KB untuk percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Sidoarjo. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah mengumumkan rencananya untuk membangun dua balai penyuluhan Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan Sukodono dan Tarik. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya percepatan penurunan angka stunting (Radarsidoarjo.co.id, 2022).

Adanya balai yang menjadi pusat koordinasi, penyuluh KB dapat berkoordinasi dengan para kader. Mulai dari melakukan pembinaan, bahkan mengadakan pertemuan. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berharap adanya kolaborasi antara BKKBN, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dengan Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan jumlah dan fungsi balai penyuluhan di lapangan. Adapun pihak media yang turut meliput atau mempublikasikan hal ini dilakukan oleh radasidoarjo.id. (Radarsidoarjo.co.id, 2022).

Selain dua kegiatan di atas, ada pula kegiatan kolaborasi berupa pemberian sosialisasi. Kegiatan tersebut merupakan sosialisasi yang ditujukan pada masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Pokja IV TP PKK Kabupaten Sidoarjo melaksanakan kegiatan sosialisasi dalam rangka mendukung program Bangga Kencana di dua lokasi yaitu Kantor Kecamatan Sukodono dan di Balai Desa Sedati Agung dengan peserta 200 orang. Keluarga sebagai unit terkecil dapat menerapkan fungsi keluarga agar terwujud keluarga yang sehat dan berkualitas.

Adapun pihak-pihak yang berkontribusi dalam kegiatan ini di antaranya ada Pokja IV TP PKK Kabupaten Sidoarjo, kemudian juga ada aparat setempat yang berada Kantor Kecamatan Sukodono dan Desa Sedati Agung, serta tentu saja masyarakat setempat juga ikut dilibatkan. Adapun media yang mempublikasikan terkait dengan hal ini yaitu PKK Sidoarjo (PKK Kabupaten Sidoarjo, 2022).

Upaya semacam ini tentu besar harapannya dapat mengatasi permasalahan stunting yang selama ini menjadi polemik yang sulit diselesaikan oleh Kabupaten Sidoarjo. Di mana tentu semua pihak tanpa terkecuali dapat bahu membahu untuk dapat menurunkan sekecil mungkin angka stunting yang ada di Kabupaten Sidoarjo.

Adanya kolaborasi dengan berbagai pihak sejalan dengan konsep *Collaborative Governance* yang memang sepatutnya dapat menjadi solusi baik dalam mengentaskan permasalahan stunting pada anak, terkhusus pada Kabupaten Sidoarjo. Di mana pihak yang terlibat tidak harus selalu dari pemerintah, pihak lain seperti swasta, LSM, masyarakat, media juga dapat berkontribusi. Lewat Program Bangga Kencana ini lah konsep tersebut dapat terealisasi.

Bentuk kolaborasi yang dimaksud adalah kerjasama antara pihak-pihak terkait yang bahu membahu menyukseskan program penanganan angka stunting. Bentuk kolaborasi ini jika dikaji dalam Ilmu Administrasi Publik dikenal dengan konsep *Collaborative Governance*. Selaras dengan teori *Collaborative Governance* oleh Ansell dan Gash (Ansell & Gash, 2008) terkait kolaborasi sebagai langkah baru dalam tata kelola pemerintahan yang melibatkan beberapa stakeholders atau pemangku kepentingan untuk membuat suatu keputusan bersama atas tujuan yang telah ditetapkan. *Collaborative Governance* pada dasarnya sebagai upaya dalam mengintegrasikan pemangku kepentingan swasta dan umum dalam suatu forum kolektif dengan lembaga publik agar terlibat dalam perumusan hasil keputusan yang berorientasi pada konsensus (Ipan et al., 2021)

Collaborative Governance juga dapat didefinisikan sebagai suatu gerakan atau tindakan kolaborasi antar beberapa instansi maupun organisasi yang terdiri dari swasta, LSM, pemerintah, juga masyarakat yang memiliki tujuan yang sama yakni menyelesaikan permasalahan yang sama agar dapat meraih tujuan yang telah dirumuskan secara bersama-sama. Adanya program Bangga Kencana menjadi salah satu contoh nyata dari penerapan *Collaborative Governance* (Utami & Alawiya, 2021).

Indonesia merupakan salah satu negara yang dengan jumlah penduduk yang cukup besar. Tak hanya itu, Indonesia juga memiliki segudang kekayaan alam yang melimpah yang mencakup ragam flora dan fauna, wilayah perairan yang luas dan masih banyak lainnya. Segala kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia bukan berarti tak memberikan Indonesia suatu masalah. Hingga kini, permasalahan Indonesia bisa dikatakan cukup beragam dari aspek ekonomi, politik, sosial budaya, dan juga kesehatan. Salah satu permasalahan yang dialami Indonesia yakni berkaitan dengan aspek kesehatan. Aspek kesehatan bisa dikatakan permasalahan vital bagi Indonesia, sebab sejak dahulu permasalahan kesehatan selalu menghampiri Indonesia. Salah satunya adalah terkait dengan stunting.

Stunting merupakan suatu keadaan di mana kurangnya tinggi badan pada anak jika dibandingkan dengan anak lain sepantarannya. Adapun penyebab dari stunting ini ialah tidak tercukupinya nutrisi yang masuk ke tubuh anak, di masa-masa pertumbuhan anak. Stunting sendiri beragam dampak yang dapat ditimbulkan, yaitu dampak dalam jangka pendek dan jangka panjang (Febriana & Hertati, 2023).

Adapun jangka pendek dari stunting meliputi terganggunya kecerdasan anak, perkembangan otak anak, gangguan metabolisme tubuh, dan gangguan pertumbuhan fisik. Sedangkan dampak jangka panjangnya meliputi menurunnya imunitas tubuh, beresiko tinggi

memiliki penyakit kronis, menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, dan juga disabilitas di usia tua nantinya. Tentu saja dampak yang diberikan bukanlah hal yang sepele, akan tetapi cenderung menjadi sangat menghawatirkan bagi masa depan anak (Febriana & Hertati, 2023).

Menurut WHO (dalam Ipan et al., 2021) mengatakan kasus stunting di negara Indonesia terbilang masih cukup tinggi. Angka stunting dikatakan tinggi pada suatu negara apabila angka prevalensinya lebih dari 20 persen, dan Indonesia mempunyai prevalensi stunting sebesar 24,4 persen hal ini didasari data dari Kementerian Kesehatan pada tahun 2021. Lebih lanjut, hasil penelitian mengatakan bahwa provinsi Jawa Timur dikatakan provinsi di Indonesia yang dibidang memiliki kasus stunting yang cukup tinggi (Marwiyah et al., 2022). Berdasarkan Data SSGI pada tahun 2021, Jawa Timur mempunyai prevalensi stunting sebesar 23.5 persen.

Melihat cukup tingginya angka stunting yang terjadi di Indonesia dan betapa mengkhawatirkan dampak yang diberikan dari adanya stunting itu sendiri. Tentu saja fenomena stunting perlu ditangani dengan tepat. Lebih tepatnya akan lebih baik jika permasalahan stunting ini dilakukan semacam upaya preventif atau pencegahan agar angka stunting tidak terus menerus naik.

Menanggulangi stunting diperlukan tindakan yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan, yaitu intervensi gizi yang dibagi menjadi dua bagian Pertama, intervensi gizi spesifik kontribusinya mencapai 30 persen, Kedua, intervensi gizi sensitif memiliki kontribusi yang cukup besar yaitu 70 persen. Hal ini berkaitan dengan kehidupan masyarakat secara umum dan menyeluruh. Pelaksanaan intervensi gizi sensitif pada dasarnya menyasar masyarakat umum tanpa terkecuali, kegiatan ini berupa pembangunan dalam bidang non-kesehatan antara lain penyediaan air bersih, penanggulangan kemiskinan, kesetaraan gender, dan sebagainya (Mediani et al., 2020).

Penanggulangan stunting di Indonesia telah tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan stunting bahwa dalam rangka menurunkan stunting ditetapkan strategi nasional yang bertujuan untuk menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas kehidupan, menjamin pemenuhan gizi, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Dalam penanganan stunting itu sendiri selain hal yang disebutkan, bisa dilakukan dengan melakukan kolaborasi dengan beberapa pihak terkait demi penurunan angka stunting (Publik et al., 2022).

Program Bangga Kencana yang menerapkan konsep *Collaborative Governance* dengan memperkuat kolaborasi antara dinas, pihak swasta, masyarakat, dan media informasi bertujuan untuk ikut berpartisipasi dalam upaya percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan pemaparan diatas perlunya dilakukan penelitian terkait **“Implementasi *Collaborative Governance* dalam Program Bangga Kencana sebagai upaya percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Sidoarjo”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dapat dirumuskan permasalahan guna memperjelas tujuan penelitian yang dilakukan. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini diantaranya:

1. Bagaimana implementasi *Collaborative Governance* dalam Program Bangga Kencana sebagai upaya percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Sidoarjo?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pada implementasi *Collaborative Governance* dalam Program Bangga Kencana sebagai upaya percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Sidoarjo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, adapun tujuan penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui implementasi *Collaborative Governance* dalam Program Bangga Kencana sebagai upaya percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pada implementasi *Collaborative Governance* dalam Program Bangga Kencana sebagai upaya percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi guna menambah ilmu dan wawasan menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kolaborasi pemerintah dan non pemerintah dalam program Bangga Kencana sebagai upaya percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Sidoarjo. Serta dapat dijadikan sebagai acuan penelitian lanjutan bagi peneliti lain sekaligus sebagai bentuk kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu administrasi publik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan masukan kepada pemerintah Kabupaten Sidoarjo terkait keberlanjutan serta pentingnya program Bangga Kencana sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah dan non pemerintah dalam suksesi program percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Sidoarjo. Melalui penelitian ini, diharapkan pula dapat memberikan manfaat berupa edukasi mengenai program Bangga Kencana sehingga dengan demikian, masyarakat dapat menjadi lebih sadar dan perhatian akan fenomena stunting, penyebab, dan dampak dari stunting.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian guna memperkaya teori-teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu dapat dijadikan sumber referensi yang dapat memperdalam bahan kajian dan pembahasan penelitian. Adapun dari penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

| No. | Nama, Judul, dan Sumber | Teori | Hasil | Perbedaan |
|-----|--|--|--|--|
| 1. | Nasya & Diana (Febriana & Hertati, 2023), Penanggulangan Stunting dalam Prespektif Collaborative Governance, Sumber : Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis. 2023 Vol 4, No. 2 | Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori indikator proses kolaborasi yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2007). Teori indikator proses kolaborasi milik Ansell dan Gash (2007) meliputi lima tahap, diantaranya a) Face to face dialogue yang berkaitan dengan komunikasi tatap muka antar stakeholders, b) Membangun kepercayaan yang dilakukan bersama demi kemudahan pencapaian kolaborasi, c) Membangun komitmen terkait tanggungjawab stakeholders, d) | Hasil : Tata kelola kolaborasi pemerintah dalam rangka mewujudkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Probolinggo dapat dikatakan telah dilaksanakan secara optimal dan menyeluruh sesuai dengan indikator proses kolaborasi Ansell & Gash. Meskipun pada dialog tatap muka masih sangat kurang intensitas pertemuan yang dilakukan antar pemangku kepentingan, namun kekurangan | Perbedaan : - Penelitian ini menggunakan teori indikator proses kolaborasi dari Ansell dan Gash. Sedangkan, teori yang digunakan pada penelitian yang akan diteliti ialah teori indikator keberhasilan Collaborative Governance dari G. Edward DeSeve. - Objek penelitian ini adalah penanggulangan stunting dalam perspektif Collaborative Governance. Sedangkan, objek penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah implementasi Collaborative |

| | | | | |
|----|---|---|---|--|
| | | Pemahaman bersama mengenai misi atau tujuan bersama antar stakeholders yang terlibat dalam kolaborasi, dan e) Hasil sementara yang berkaitan dengan kesuksesan proses kolaborasi. | tersebut tidak mengubah kenyataan bahwa kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam rangka penanganan stunting di Kabupaten Probolinggo berhasil menunjukkan adanya penurunan signifikan angka stunting sebanyak 377 jiwa dalam kurun waktu 5 bulan. | Governance dalam Program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo. |
| 2. | Evalia & Herbasuki (Publik et al., 2022), Collaborative Governance dalam Penanggulangan Stunting di Desa Kalirandu, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Sumber : Journal Of Public Policy And Management Review. 2021 Vol. 10, No. 2 | Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori proses kolaborasi dari model Collaborative Governance yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2007). Teori proses kolaborasi milik Ansell dan Gash (2007) meliputi lima tahap, diantaranya a) Dialog tata muka, b) Membangun kepercayaan, c) Komitmen dalam proses, d) Pemahaman bersama, dan e) Hasil sementara. | Hasil : Proses kolaborasi menurut model Collaborative Governance Ansell & Gash yang dimulai dengan dialog tata muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil sementara yang digunakan sudah berjalan cukup efektif dilihat dari penurunan angka stunting dan partisipasi yang baik dari para aktor. Keberhasilan kolaborasi pun dirasakan secara nyata meskipun | Perbedaan : <ul style="list-style-type: none"> - Penelitian ini menggunakan teori proses kolaborasi dari model Collaborative Governance milik Ansell dan Gash. Sedangkan, teori yang digunakan pada penelitian yang akan diteliti ialah teori indikator keberhasilan Collaborative Governance dari G. Edward DeSeve. - Objek penelitian ini adalah Collaborative Governance dalam penanggulangan stunting di Desa Kalirandu. Sedangkan, objek |

| | | | | |
|----|---|---|---|---|
| | | | <p>masih kecil dan dalam prosesnya terdapat beberapa hambatan seperti keterbatasan Sumber Daya Manusia dan komitmen kepala desa yang rendah sehingga dibutuhkan keterlibatan peranan aktor lain seperti Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), dan sektor swasta melalui Corporate Social Responsibility (CSR).</p> | <p>penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah implementasi Collaborative Governance dalam Program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo.</p> |
| 3. | <p>(Efiyanti et al., 2022), Analisis Implementasi Kebijakan Promosi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Melalui Media Online Terhadap Pengetahuan Remaja di Kota Banda Aceh Sumber : TheJournalish Social and Government. 2022 Vol. 3, No. 2</p> | <p>Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan milik Van Meter dan Van Horn yang meliputi beberapa variabel yang dapat mempengaruhi kinerja kebijakan, diantaranya 1) Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, 2) Sumber-sumber kebijakan, 3) Karakteristik badan-badan pelaksana, 4) Kondisi-kondisi</p> | <p>Hasil : Standar dan sasaran kebijakan promosi program Bangga Kencana sudah sangat tepat berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn mengenai implementasi kebijakan dimana sasaran promosi program Bangga Kencana ditujukan kepada anak muda melalui media online. Kebijakan promosi yang dilakukan oleh 7 orang tenaga pokok dan dibantu oleh 82 pegawai</p> | <p>Perbedaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penelitian ini menggunakan teori implementasi milik Van Meter dan Van Horn. Sedangkan, teori yang digunakan pada penelitian yang akan diteliti ialah teori indikator keberhasilan Collaborative Governance dari G. Edward DeSeve. - Objek penelitian ini adalah implementasi kebijakan promosi pada program |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | <p>ekonomi, sosial, dan politik, 5) Sikap para pelaksana, 6) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan</p> | <p>BKKBN berperan melakukan komunikasi dalam merubah mindset kawula muda dalam merencanakan masa depan. Meski dalam implementasinya, pemahaman remaja terhadap program Bangga Kencana masih belum optimal dan masih perlu adanya partisipasi dari berbagai pihak baik pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).</p> | <p>Bangga Kencana melalui media online terhadap remaja di Kota Banda Aceh. Sedangkan, objek penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah implementasi Collaborative Governance dalam Program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo.</p> <p>- Fokus penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana implementasi kebijakan promosi program Bangga Kencana dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran remaja akan isu-isu kependudukan dan kesejahteraan keluarga. Sedangkan, fokus penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana implementasi serta apa saja faktor pendukung dan</p> |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|----|--|---|--|--|
| | | | | penghambat pada kolaborasi yang dilakukan dalam program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo. |
| 4. | <p>Feby Jenifer S. Sokoy (Jenifer Sokoy et al., n.d.), Implementasi Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dalam Proses Percepatan Penurunan Angka Stunting di Kabupaten Jayapura, Sumber : Institut Pemerintahan Dalam Negeri. 2023 https://prints.ipdn.ac.id/</p> | <p>Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi yang dikemukakan oleh Edward III dengan empat indikator diantaranya 1) Komunikasi, 2) Sumber daya, 3) Disposisi atau sikap, dan 4) Struktur birokrasi.</p> | <p>Hasil : Implementasi program Bangga Kencana di Kabupaten Jayapura oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sudah berjalan dengan baik sesuai indikator teori implementasi Edward III. Hanya saja masih ada beberapa masalah dan hambatan yang diantaranya meliputi kejelasan informasi, kurangnya anggaran pelaksanaan dan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang program, kurangnya Sumber Daya Manusia di lapangan, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya stunting. Selanjutnya, dilakukan upaya-</p> | <p>Perbedaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penelitian ini menggunakan teori implementasi dari Edward III dengan empat indikator meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Sedangkan, teori yang digunakan pada penelitian yang akan diteliti ialah teori indikator keberhasilan Collaborative Governance dari G. Edward DeSeve. - Fokus penelitian ini adalah untuk menilai efektivitas program dalam meningkatkan gizi ibu dan anak, mempromosikan pemberian ASI eksklusif, dan memberikan makanan pendamping ASI untuk bayi hingga usia 24 bulan. Sedangkan, fokus penelitian yang |

| | | | | |
|----|---|---|---|--|
| | | | upaya oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura yakni meningkatkan kualitas dan jumlah sumber daya manusia, mengalokasikan dana guna prasarana dan sarana yang terbilang kurang, mengajukan anggaran menunjang keberhasilan program, dan melakukan penyuluhan. | akan diteliti oleh peneliti adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa bagaimana implementasi serta apa saja faktor pendukung dan penghambat pada kolaborasi yang dilakukan dalam program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo. |
| 5. | Nurani et al (Utami & Alawiya, 2021), Peran Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam Mewujudkan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana “Bangga Kencana” (Studi di BKKBN Provinsi Jawa Tengah) Sumber : Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers. 2020 6-7 Oktober | Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tentang faktor-faktor yang mempengaruhi hukum milik Soerjono Soekanto yang diantaranya meliputi faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor budaya, serta faktor personal dan sosial. Penelitian ini juga menggunakan teori faktor -faktor yang mempengaruhi | Hasil : Peran BKKBN Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan program Bangga Kencana diantaranya meliputi sinkronisasi kebijakan-kebijakan terkait dengan Program Bangga Kencana baik di pusat maupun daerah, melakukan program komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat | Perbedaan : <ul style="list-style-type: none"> - Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan penelitian yang akan diteliti peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. - Penelitian ini menggunakan teori faktor-faktor yang mempengaruhi hukum milik Soerjono Soekanto |

| | | | | |
|--|--|---|---|--|
| | | <p>bekerjanya hukum di masyarakat milik Robert B. Seidman yang diantaranya terbagi dalam faktor personal dan faktor sosial.</p> | <p>dengan bekerjasama dengan instansi lain, stake holder, atau tokoh masyarakat, memperkuat kapasitas infrastruktur regulasi yang mendukung operasional maupun eksistensi lembaga terkait Program Bangga Kencana, penguatan dukungan sarana, prasarana dan anggaran untuk menyelenggarakan program Bangga Kencana dalam upaya menjaga kesinambungan dan keberlangsungan pelayanan pengendalian penduduk dan KB kepada masyarakat.</p> | <p>dan faktor-faktor yang mempengaruhi bekerjanya hukum di masyarakat milik Robert B. Seidman. Sedangkan, teori yang digunakan pada penelitian yang akan diteliti ialah teori indikator keberhasilan Collaborative Governance dari G. Edward DeSeve.</p> <p>- Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan faktor-faktor yang cenderung mempengaruhi peran BKKBN Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana). Sedangkan, fokus penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa bagaimana implementasi serta apa saja faktor pendukung dan</p> |
|--|--|---|---|--|

| | | | | |
|----|---|---|---|---|
| | | | | penghambat pada kolaborasi yang dilakukan dalam program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo. |
| 6. | Nabila & Dini (Shauma, Udzu Nabila & Purbaningrum, 2022), Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi Sumber : Jurnal Kebijakan Publik. 2022 Vol. 13, No. 2 | Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori model implementasi kebijakan milik Van Meter dan Van Horn (1975) yang terdiri dari enam indikator diantaranya meliputi a) Ukuran dan tujuan kebijakan, b) Sumber daya, c) Karakteristik agen pelaksana, d) Sikap atau kecenderungan pelaksana, e) Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, dan f) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. | Hasil : Pelaksanaan implementasi kebijakan percepatan pencegahan stunting terintegrasi sesuai Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 di Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang belum berjalan dengan optimal. Berdasarkan analisis menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn menunjukkan masih terdapat indikator yang belum tercapai dengan baik, diantaranya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berada di tingkat bawah khususnya kader masih kurang baik dari segi kuantitas maupun kualitas; karakteristik | Perbedaan : - Penelitian ini menggunakan teori model implementasi milik Van Meter dan Van Horn. Sedangkan, teori yang digunakan pada penelitian yang akan diteliti ialah teori indikator keberhasilan Collaborative Governance dari G. Edward DeSeve. - Objek penelitian ini adalah implementasi kebijakan percepatan pencegahan stunting terintegrasi. Sedangkan, objek penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah implementasi Collaborative Governance dalam Program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo. |

| | | | | |
|----|---|--|---|--|
| | | | <p>organisasi pelaksana belum terpenuhi dengan baik; sikap para pelaksana, khususnya pada pemahaman masyarakat terhadap kebijakan Peraturan Bupati No. 16 Tahun 2020 masih kurang; komunikasi dan koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum optimal, karena masih terdapat kegiatan yang belum tepat sasaran dalam pelaksanaannya; kondisi lingkungan sosial, lingkungan ekonomi dan lingkungan politik belum sepenuhnya mendukung keberhasilan kebijakan percepatan pencegahan stunting terintegrasi di wilayah Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang.</p> | <p>- Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kebijakan Peraturan Bupati No. 16 Tahun 2020 tentang percepatan pencegahan stunting terintegrasi di Kabupaten Tangerang diimplementasikan. Sedangkan, fokus penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana implementasi serta apa saja faktor pendukung dan penghambat pada kolaborasi yang dilakukan dalam program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo.</p> |
| 7. | Rizal & Febri (Saputra & Yuliani, 2021), Kinerja Kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan | Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori indikator | Hasil : Kinerja kantor perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga | <p>Perbedaan :</p> <p>- Penelitian ini menggunakan teori indikator pengukuran kinerja</p> |

| | | | | |
|--|---|--|--|---|
| | <p>Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Riau dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), Sumber : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) FISIP. 2021 Vol. 8 No. 2</p> | <p>pengukuran kinerja individu yang dikemukakan oleh Amstrong dan Baron (1998). Indikator pengukuran kinerja milik Amstrong dan Baron dinyatakan dalam 4 kriteria diantaranya 1) Kuantitas, 2) Kualitas, 3) Produktivitas, dan 4) Ketepatan Waktu.</p> | <p>Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Riau dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) berjalan dengan baik dan optimal. Hal ini diukur menggunakan indikator kinerja Amstrong dan Baron (1998) dengan melihat aspek kuantitas, kualitas, produktivitas, dan ketepatan waktu. Sedangkan faktor penghambat kinerja kantor BKKBN Provinsi Riau dalam pelaksanaan program Bangga Kencana diantaranya adalah disiplin dan anggaran karena dipengaruhi oleh situasi pandemi Covid-19 dan faktor usia pegawai.</p> | <p>individu yang dikemukakan oleh Amstrong dan Baron (1998). Sedangkan, teori yang digunakan pada penelitian yang akan diteliti ialah teori indikator keberhasilan Collaborative Governance dari G. Edward DeSeve.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Objek penelitian ini adalah kinerja Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Riau dalam program Bangga Kencana. Sedangkan, objek penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah implementasi Collaborative Governance dalam Program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo. - Fokus penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kinerja Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Riau dalam program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga |
|--|---|--|--|---|

| | | | | |
|----|--|--|--|---|
| | | | | <p>Kencana).</p> <p>Sedangkan, fokus penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana implementasi serta apa saja faktor pendukung dan penghambat pada kolaborasi yang dilakukan dalam program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo.</p> |
| 8. | <p>Siti et al (Marwiyah et al., 2022), Implementasi Program Weljo Peduli Stunting Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Tongas (Studi Pada Desa Sumendi Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo), Sumber : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP). 2022 Vol. 6, No. 3</p> | <p>Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan milik Van Meter dan Van Horn yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi melalui enam variabel diantaranya a) Tujuan dan standar yang jelas, b) Sumber daya (dana atau berbagai insentif yang dapat memfasilitasi keefektifan implementasi), c) Kualitas hubungan interorganisasional, d) Karakteristik</p> | <p>Hasil :</p> <p>Implementasi program Walijo peduli stunting di Desa Sumendi, Kecamatan Tongas telah berjalan dengan baik dan optimal berdasarkan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn dimana sumber daya program baik dari segi dana maupun sumber daya manusia telah memadai untuk pelaksanaan program, kualitas hubungan interorganisasional cukup baik dibuktikan dengan</p> | <p>Perbedaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. Sedangkan, teori yang digunakan pada penelitian yang akan diteliti ialah teori indikator keberhasilan Collaborative Governance dari G. Edward DeSeve. - Objek penelitian ini adalah implementasi program Weljo Peduli Stunting di Wilayah Kerja Puskesmas Tongas. |

| | | | | |
|----|--|--|---|--|
| | | <p>lembaga/organisasi pelaksana, e) Lingkungan politik, sosial, dan ekonomi, serta f) Disposisi tanggapan atau sikap para pelaksana.</p> | <p>adanya koordinasi yang efektif antara Puskesmas Tongas, bidan desa, dan para welijo dalam pelaksanaan program, tujuan dan standar program telah jelas dengan didukung visi, misi, dan budaya kerja yang baik, serta sikap para pelaksana program yang sangat mendukung implementasi program welijo stunting.</p> | <p>Sedangkan, objek penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah implementasi Collaborative Governance dalam Program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo.</p> <p>- Fokus penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dan menganalisis efektivitas program Welijo Peduli Stunting serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program tersebut. Sedangkan, fokus penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana implementasi serta apa saja faktor pendukung dan penghambat pada kolaborasi yang dilakukan dalam program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo.</p> |
| 9. | Fury & Hendra (Putri & Sukmana, 2022), | Teori yang digunakan dalam penelitian ini | Hasil : Strategi pemerintah desa Kedungkendo | <p>Perbedaan :</p> <p>- Penelitian ini menggunakan</p> |

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| | <p>Strategi Pemerintah Desa dalam Pencegahan Stunting di Desa Kedungkendo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, Sumber : Jurnal Administrasi Negara. 2022 Vol. 10 No. 2</p> | <p>adalah teori model strategi pemerintah dari Geoff Mulgan (2009) yang terdiri dari tiga indikator yakni 1) Tujuan (Goals), 2) Lingkungan (Environment), dan 3) Tindakan (Action).</p> | <p>dalam pencegahan stunting belum tercapai diukur dengan model strategi pemerintah dari Geoff Mulgan (2009:19), hal tersebut disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat desa setempat dalam memahami bahaya stunting. Dengan demikian, pemerintah desa Kedungkendo merumuskan beberapa strategi yang diantaranya mengaktifkan sosialisasi akan bahaya dan resiko stunting kepada masyarakat terutama balita dan ibu hamil melalui posyandu dan meningkatkan partisipasi serta kepedulian masyarakat melalui sebuah gerakan kerjasama antara bidan desa, kader posyandu, dan masyarakat dalam sebuah gerakan yang dinamakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dengan kegiatan berupa pelatihan</p> | <p>model strategi pemerintah dari Geoff Mulgan (2009). Sedangkan, teori yang digunakan pada penelitian yang akan diteliti ialah teori indikator keberhasilan Collaborative Governance dari G. Edward DeSeve.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Objek penelitian ini adalah strategi pemerintah desa dalam pencegahan stunting. Sedangkan, objek penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah implementasi Collaborative Governance dalam Program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo. - Fokus penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas strategi pemerintah desa dalam upaya mencegah kasus stunting di Desa Kedungkendo, Kecamatan Candi. Sedangkan, fokus penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah untuk |
|--|---|---|---|---|

| | | | | |
|-----|--|--|---|---|
| | | | perbaikan gizi dan pijat akupresur untuk meningkatkan nafsu makan anak. | mendesripsikan dan menganalisis bagaimana implementasi serta apa saja faktor pendukung dan penghambat pada kolaborasi yang dilakukan dalam program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo. |
| 10. | Natalia et al (Botero-Tovar et al., 2020), Factors influencing delivery of intersectoral actions to address infant stunting in Bogota, Colombia – a mixed methods case study, Sumber : BMC Public Health. (2020) 20:925 | Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konsep intersektoral yang mengacu pada kerjasama lintas sektor dalam upaya pencapaian tujuan bersama. Penelitian ini juga mengadopsi konsep kemitraan Publik-Swasta atau Public Private Partnership (PPP) yang dapat dijadikan sebagai strategi efektif dalam penyediaan sumber daya dan dukungan intervensi khususnya di bidang kesehatan. | Hasil : Intersectoral actions atau tindakan lintas sektoral yang merupakan penggabungan tindakan dari berbagai sektor seperti pemerintah dan swasta sangat diperlukan dalam pencegahan stunting di Bogota, Colombia. Kemauan politik, motivasi sumber daya manusia, dan pengakuan peningkatan kesehatan merupakan hasil kolaborasi yang sekaligus merupakan faktor yang memfasilitasi tindakan lintas sektoral. Implementasi kolaborasi tindakan lintas sektoral dapat | Perbedaan : - Penelitian ini merupakan studi kasus dengan pengembangan desain metode campuran konkuren . Sedangkan penelitian yang akan diteliti peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. - Penelitian ini menggunakan konsep intersektoral dan kemitraan Publik-Swasta atau Public Private Partnership (PPP) . Sedangkan, teori yang digunakan pada penelitian yang akan diteliti ialah teori indikator keberhasilan Collaborative |

| | | | | |
|-----|--|---|---|---|
| | | | terhambat karena kurangnya keterampilan koordinasi dan manajemen antar aktor. | <p>Governance dari G. Edward DeSeve.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Objek penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tindakan lintas sektoral untuk mengatasi kasus stunting pada bayi di Bogota, Kolumbia. Sedangkan, objek penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah implementasi Collaborative Governance dalam Program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo. |
| 11. | Paola et al (Rueda-Guevara et al., 2021), Worldwide evidence about infant stunting from a public health perspective: A systematic review, Sumber : Biomedica. 2021;41:541-54 | Teori yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti pedoman Item Pelaporan Pilihan untuk Tinjauan Sistematis dan Analisis Meta atau <i>Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses</i> (PRISMA) yang telah terdaftar di Daftar Internasional Tinjauan Prospektif Sistematis atau | Hasil : Sebagian besar strategi pencegahan stunting, intervensi gizi, dan kolaborasi antar sektoral dilakukan di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah, terutama di wilayah Afrika, Asia Tenggara, dan Amerika. Selanjutnya, bukti mengenai pencegahan stunting pada anak hingga usia 2 | <p>Perbedaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penelitian ini menggunakan metode tinjauan sistematis. Sedangkan penelitian yang akan diteliti peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. - Penelitian ini mengikuti pedoman PRISMA yang telah terdaftar dalam PROSPERO. |

| | | | | |
|-----|---|---|--|---|
| | | <i>International Register of Systematic Prospective Reviews (PROSPERO).</i> | <p>tahun berdasarkan tahap kehidupan dan wilayah menunjukkan perlunya melakukan tindakan untuk memperkuat model dan implementasi intervensi gizi. Dalam proses pencegahan dan/atau intervensi stunting, masih sering ditemui kesenjangan pengetahuan mengenai koordinasi antar sektoral, sehingga hal tersebut mengakibatkan terhambatnya pencapaian tujuan bersama.</p> | <p>Sedangkan, teori yang digunakan pada penelitian yang akan diteliti ialah teori indikator keberhasilan Collaborative Governance dari G. Edward DeSeve.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Objek penelitian ini adalah bukti-bukti dari seluruh dunia mengenai pencegahan stunting melalui intervensi gizi dan upaya kolaborasi lintas sektoral dalam melawan stunting pada bayi. Sedangkan, objek penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah implementasi Collaborative Governance dalam Program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo. |
| 12. | <p>Isna Azizatul Himah (Himah et al., 2023), Collaborative Governance dalam Program Angkutan Siswa Disabilitas dalam Upaya Aksesibilitas Pendidikan di Kabupaten Nganjuk, Sumber :</p> <p>https://repository.untagsby.ac.id/</p> | <p>Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori indikator keberhasilan Collaborative Governance dari G. Edward DeSeve. Terdapat delapan item penting yang dapat digunakan</p> | <p>Hasil : Kolaborasi pada program angkutan disabilitas di Kabupaten Nganjuk berjalan cukup efektif ditinjau dari indikator keberhasilan kolaborasi Deseve. Namun, masih</p> | <p>Perbedaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Objek penelitian ini adalah Collaborative Governance dalam program Angkutan Siswa Disabilitas (Angsa Sadis) di Kabupaten Nganjuk. Sedangkan, objek penelitian yang |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | untuk mengukur keberhasilan <i>collaborative</i> atau kolaborasi dalam tata kelola pemerintahan, diantaranya 1) Struktur jaringan, 2) Komitmen terhadap tujuan, 3) Kepercayaan antar stakeholder, 4) Kejelasan tata kelola, 5) Akses terhadap kekuasaan, 6) Pembagian akuntabilitas dan responsibilitas, 7) Berbagi informasi, dan 8) Akses terhadap sumber daya. | ditemukan kekurangan yang perlu ditindaklanjuti agar proses kolaborasi lebih efektif dan efisien diantaranya dengan menambah jaringan moda transport sekolah luar biasa yang ada di Kabupaten Nganjuk dan menambah inovasi berupa aplikasi agar dapat diakses oleh seluruh masyarakat yang ingin menggunakan layanan angkutan disabilitas milik Kabupaten Nganjuk. | akan diteliti oleh peneliti adalah implementasi Collaborative Governance dalam Program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo. |
|--|--|---|--|--|

Sumber: Tabel dikelola oleh penulis

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian ini berfokus pada implementasi Collaborative Governance dan faktor pendukung serta penghambat kolaborasi dalam program Bangga Kencana sebagai upaya percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Sidoarjo. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keberhasilan Collaborative Governance dari G. Edward DeSeve dengan delapan indikator yang meliputi struktur jaringan, komitmen terhadap tujuan, kepercayaan antar stakeholder, kejelasan tata kelola, akses terhadap kekuasaan, pembagian akuntabilitas dan responsibilitas, berbagi informasi, dan akses terhadap sumber daya. Terdapat banyak perbedaan dari penelitian terdahulu pada penelitian ini, perbedaan tersebut meliputi perbedaan teori yang digunakan, metode penelitian, objek penelitian, dan fokus penelitian.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Implementasi

Setiap perumusan kebijakan baik menyangkut suatu program maupun kegiatan-kegiatan tertentu selalu diiringi dengan tindakan pelaksanaan atau implementasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah implementasi diartikan sebagai sebuah pelaksanaan atau penerapan. Implementasi berkaitan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan guna mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Van Meter dan Van Horn dalam Solichin (2008:135) menyebutkan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individual/pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah swasta yang diarahkan pada pencapaian dan tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Adapun menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Leo Agustino (2006:139) implementasi merupakan pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan dari badan peradilan. Implementasi pada intinya merujuk pada tindakan yang dilakukan dengan berdasar pada kebijakan yang telah ditentukan.

Keberhasilan pelaksanaan atau implementasi kebijakan ditentukan oleh banyak faktor yang saling berhubungan antara satu dengan lain. Edward III dalam Subarsono (2006:90) menyebutkan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi setidaknya oleh empat variabel atau faktor, diantaranya:

- a) Komunikasi, merujuk pada pengetahuan dan kemudahan akses yang dimiliki oleh para pelaksana mengenai tujuan dan sasaran kebijakan sehingga hal tersebut dapat meminimalisir distorsi implementasi.
- b) Sumber daya (resource), merujuk pada sumber daya manusia seperti halnya kompetensi perseorangan yakni para pelaksana dan sumber finansial sebagai penunjang keberhasilan implementasi kebijakan.
- c) Sikap birokrasi dan pelaksana (disposisi), merujuk pada watak dan karakteristik para pelaksana. Disposisi yang baik menghasilkan kinerja yang baik dalam suatu implementasi kebijakan.
- d) Faktor struktur birokrasi, merujuk pada kejelasan pembagian kerja, fungsi dan spesialisasi tugas, hingga penyampaian pertanggungjawaban.

Berbeda dengan Edward III, Paul Sabatier (1986) dalam Purwanto dan Sulistyastuti (2012:19) menyebutkan setidaknya ada enam variabel utama yang dianggap memberi kontribusi keberhasilan atau kegagalan implementasi. Enam variabel tersebut diantaranya:

1. Tujuan atau sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten.
2. Dukungan teori yang kuat dalam merumuskan kebijakan.

3. Proses implementasi memiliki dasar hukum yang jelas sehingga menjamin terjadi kepatuhan para petugas di lapangan dan kelompok sasaran.
4. Komitmen dan keahlian para pelaksana kebijakan.
5. Dukungan para *stakeholder*.
6. Stabilitas kondisi sosial, ekonomi, dan politik.

Selanjutnya, terdapat beberapa ahli mengemukakan teorinya dalam menganalisis implementasi kebijakan publik, diantaranya:

a) Teori G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli

Subarsono dalam Maunde et.al mengutip pandangan G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli bahwa terdapat empat faktor atau variabel yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik. Empat faktor tersebut, antara lain:

- 1) Keadaan lingkungan, lingkungan memberikan pengaruh yang besar dalam sebuah implementasi kebijakan. Lingkungan dimaksudkan baik untuk lingkungan sosial dan budaya, termasuk partisipasi target sasaran kebijakan.
- 2) Hubungan antar organisasi, implementasi kebijakan membutuhkan dukungan dan koordinasi penuh antar para pelaksana dalam rangka menyukseskan rencana bersama.
- 3) Sumber daya organisasi untuk implementasi kebijakan, implementasi kebijakan membutuhkan dukungan sumber daya manusia dan sumber finansial (non manusia).
- 4) Karakteristik dan kapabilitas agen pelaksana, agen atau para pelaksana yang memiliki karakteristik dan kapabilitas yang baik sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

b) Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Model Mazmanian dan Sabatier menjelaskan bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuan dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Terdapat tiga faktor atau variabel besar yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Karakteristik dari masalah (*tractability of the problem*), meliputi:
 - a. Kesulitan-kesulitan teknis,
 - b. Keberagaman perilaku yang diatur,
 - c. Persentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran, dan
 - d. Tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki.

- 2) Karakteristik kebijakan/undang-undang (ability of statute to structure implementation), meliputi:
 - a. Kecermatan dan kejelasan perjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan dicapai,
 - b. Keterandalan teori kausalitas yang diperlukan,
 - c. Ketetapan alokasi sumber dana,
 - d. Keterpaduan hierarki di dalam lingkungan dan diantara lembaga-lembaga atau instansi-instansi pelaksana,
 - e. Aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana,
 - f. Kesepakatan para pelaksana terhadap tujuan dalam undang-undang, dan
 - g. Akses formal pihak-pihak luar.
- 3) Variabel lingkungan (nonstatutory variables affecting implementation), meliputi:
 - a. Kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi,
 - b. Dukungan publik,
 - c. Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat, dan
 - d. Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pelaksana.

2.2.2 Program

Pada setiap proses pelaksanaan suatu program dapat berhasil, kurang berhasil, bahkan gagal sama sekali bila ditinjau melalui hasil atau luaran yang dicapai. Karena dalam proses tersebut banyak unsur yang turut andil dan terlibat dalam memberikan pengaruh yang bersifat mendukung maupun menghambat pencapaian tujuan suatu program. Program merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan berpegang pada kebijaksanaan, prosedur, dan sumber daya yang ada.

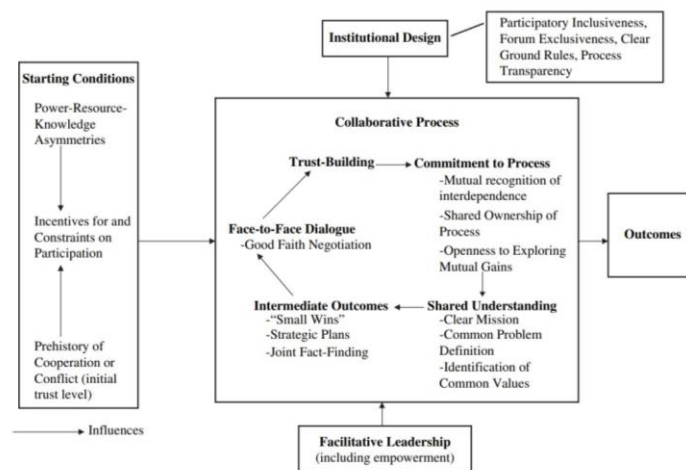
Rohman menyebutkan bahwa program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan (Andani et al., 2019). Sedangkan Joan L. Herman yang dikutip oleh Farida mengemukakan definisi program sebagai segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh (Kogoya et al., 2021). Berdasarkan beberapa definisi yang ada, dapat disimpulkan bahwa program merupakan rencana yang jelas dan konkret dengan sasaran, kebijaksanaan, prosedur, anggaran, dan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan.

2.2.3 Collaborative Governance

Tata kelola pemerintahan kolaboratif menurut Ansell dan Gash (Ansell & Gash, 2008) merupakan salah satu jenis tata kelola dimana aktor-aktor publik dan swasta memiliki kesempatan untuk dapat bekerja sama dan berproses secara kolektif dalam menetapkan undang-undang dan aturan penyediaan barang publik. *“Collaborative governance is*

therefore a type of governance in which public and private actors work collectively in distinctive ways, using particular processes, to establish laws and rules for the provision of public goods”. Konsep pemerintahan kolaboratif Ansell dan Gash menekankan pada pentingnya proses dan kerjasama antara aktor publik (pemerintah) dan aktor privat (swasta) dalam menghasilkan produk hukum, aturan, maupun kebijakan yang tepat untuk publik atau masyarakat.

Agrawal dan Lemos mendefinisikan *Collaborative Governance* sebagai sebuah proses yang melibatkan berbagai stakeholder yang masing-masing dari stakeholder tersebut memiliki kepentingan-kepentingan yang diusung dalam mencapai tujuan bersama. *Collaborative governance* tidak hanya terbentuk atas lembaga pemerintah dan non pemerintah saja akan tetapi juga terbentuk karena adanya “*multipartner governance*” yang meliputi komunitas sipil, masyarakat, dan sektor privat dan penyusunan rencana seperti kerja sama privat-sosial dan publik-privat. (Qoyimah et al., 2023)



Gambar 2.1 Model *Collaborative Governance*

Sumber: *Model of Collaborative Governance* Ansell dan Gash (2008)

Ansell dan Gash dalam jurnalnya *Collaborative Governance in Theory and Practice* merumuskan model *collaborative governace* berdasarkan kajian literatur. Model *Collaborative Governance* menurut Ansell dan Gash (Muklis et al., 2022) terdiri atas empat variabel utama, diantaranya :

1. *Starting Condition* (Kondisi Awal)

Pada tahap kondisi awal dalam relasi antar *stakeholder*, masing-masing aktor memiliki latar belakang yang berbeda yang dapat menghasilkan sebuah hubungan asimetris dalam relasi yang dijalankan.

2. *Institusional Design* (Desain Kelembagaan)

Desain kelembagaan merujuk pada aturan dasar dalam berkolaborasi sebagai sebuah legitimasi secara prosedural dalam suatu kolaborasi. Pada tahap desain

kelembagaan, aturan main dalam partisipasi kolaborasi, forum yang dibentuk, aturan pelaksanaan yang jelas, dan transparansi dalam proses pelaksanaan kolaborasi menjadi hal yang paling ditekankan bagi seluruh pemangku kepentingan.

3. *Facilitative Leadership* (Kepemimpinan Fasilitatif)

Dalam proses kolaborasi sangat mungkin terjadi atau ditemukan adanya konflik/perselisihan dan adanya ketidakpercayaan yang besar antar pemangku kepentingan. Maka dibutuhkan kepemimpinan yang dapat diterima, dipercaya, dan dihormati oleh para pemangku kepentingan yang dapat diandalkan sebagai mediator dalam kolaborasi.

Selain sebagai mediator dalam kolaborasi, kepemimpinan penting untuk merangkul, memberdayakan, dan melibatkan pemangku kepentingan dalam rangka mobilisasi antar pemangku kepentingan guna memajukan kolaborasi (Vangen & Huxham, 2003).

Ryan dalam Ansell dan Gash (Ansell & Gash, 2008) mengidentifikasi tiga komponen kepemimpinan kolaboratif yang efektif, yaitu:

- a. Manajemen yang cukup terhadap proses kolaborasi
- b. Pengelolaan kemampuan melaksanakan kredibilitas teknis
- c. Memastikan bahwa kolaborasi tersebut diberdayakan untuk membuat keputusan yang kredibel dan meyakinkan bagi semua aktor.

4. *Collaborative Process* (Proses Kolaborasi)

Model proses kolaborasi mengembangkan kolaborasi sebagai perkembangan tahapan. Gray dalam Ansell dan Gash (Ansell & Gash, 2007) mendefinisikan tiga tahapan proses kolaborasi antara lain *problem setting* (penentuan permasalahan), *direction setting* (penentuan tujuan), dan implementasi. Tahapan kolaboratif dapat dimulai dari mana saja, diantaranya :

1. Dialog Tatap Muka (*Face to Face*)

Semua *collaborative governance* dibangun berdasarkan adanya “dialog antar para pemangku kepentingan”. Dialog ini sebagai sebuah proses, yang berorientasi pada lahirnya konsensus / kesepakatan. Dialog pemangku kepentingan dilakukan untuk mengidentifikasi peluang dengan mengedepankan narasi bahwa akan adanya keadaan “saling menguntungkan” para pemangku kepentingan bila dapat berkolaborasi dengan baik.

2. Membangun Kepercayaan (*Trust Building*)

Membangun kepercayaan tidak dapat dipisahkan dari proses dialog. Para pemimpin kolaborasi harus mampu membangun kepercayaan diantara para pemangku kepentingan. Proses dalam membangun kepercayaan merupakan

proses jangka panjang yang memakan waktu dan membutuhkan komitmen yang tinggi.

3. Komitmen Terhadap Proses (*Commitment to Process*)

Adanya kondisi saling ketergantungan yang tinggi diantara para pemangku kepentingan meningkatkan komitmen untuk berkolaborasi. Perlu ditekankan bahwa berkolaborasi bukanlah kesepakatan satu kali akan tetapi merupakan sebuah proses kegiatan kerjasama yang berkelanjutan dan saling menguntungkan.

4. Pemahaman Bersama (*Share Understanding*)

Pada titik tertentu, para pemangku kepentingan harus mampu mengembangkan pemahaman bersama tentang apa yang dapat dicapai. Pemahaman bersama ini dapat berupa adanya tujuan bersama yang jelas, definisi masalah yang dihadapi bersama dan pemahaman bersama mengenai nilai yang akan di capai dalam berkolaborasi.

5. Hasil Antara (Menengah/Pertengahan)

Kolaborasi lebih mungkin berlanjut ketika hasil dari tujuan dan keuntungan dari kolaborasi dapat dirasakan secara nyata walaupun masih kecil sebagai sebuah hasil antara (pertengahan) dari proses kolaborasi. Hasil kecil (*small win*) dapat menjadi pendorong dalam membangun kepercayaan dan komitmen bersama para pemangku kepentingan.

Dalam *collaborative governance* ada kriteria yang dapat menjadi tolak ukur keberhasilan dan kegagalannya. Adanya kriteria penting guna menilai suatu praktik *collaborative governance* telah berhasil atau justru gagal dalam proses implementasinya. G. Edward DeSeve dalam jurnalnya *Integration and Innovation in the Intelligence Community: The Role of a Netcentric Environment, Managed Networks, and Social Networks* (2009) menyebutkan untuk mengukur keberhasilan *collaborative* atau kolaborasi dalam tata kelola pemerintahan terdapat delapan item penting yang diantaranya meliputi :

1. *Networked Structure* (Struktur Jaringan)

Struktur jaringan menjelaskan mengenai deskripsi konseptual dari keterkaitan antar elemen yang menyatu secara bersama-sama dan mencerminkan unsur-unsur fisik dari jaringan yang ditangani. Dalam tata kelola pemerintah kolaboratif, unsur jaringan tidak boleh membentuk hierarki dengan kekuasaan dari salah satu pihak. Jaringan pada tata kelola kolaboratif harus bersifat organis tanpa ada hierarki kekuasaan, dominasi, dan monopoli. Sehingga masing-masing *stakeholder* dapat berpartisipasi dengan jaminan kesetaraan hak, kewajiban, tanggung jawab, otoritas dan kesempatan dalam mencapai tujuan bersama.

2. *Commitment to a Common Purpose* (Komitmen terhadap tujuan)

Commitment to a common purpose merupakan alasan mengapa sebuah struktur jaringan harus ada yakni karena perhatian dan komitmen untuk mencapai tujuan-tujuan positif yang dilakukan secara bersama-sama. Komitmen akan bergantung pada kepercayaan antar *stakeholder* dan akan sulit jika pada prosesnya terdapat keraguan dalam mencapai tujuan. Komitmen yang terjalin dalam tata kelola pemerintah kolaboratif harus ditujukan kepada kepentingan bersama melalui pencarian solusi bersama.

3. *Trust among the Participant* (Kepercayaan antar *stakeholder*)

Kepercayaan antar *stakeholder* dalam sebuah jaringan didasarkan pada hubungan profesional atau sosial. Kepercayaan antar *stakeholder* termasuk juga memberikan keyakinan bahwa partisipasi antar pemangku kepentingan dalam suatu jaringan hanyalah ditujukan untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga dalam hal ini, setiap *stakeholder* harus saling percaya sebagai wujud hubungan profesional yang terjalin guna mencapai keberhasilan pelaksanaan pemerintah kolaboratif.

4. *Governance Commit to User* (Kejelasan dalam tata kelola)

Deseve menjelaskan bahwa dalam melakukan program kolaborasi harus menekankan pada kejelasan tata kelola program kolaborasi yang akan dilaksanakan. Kejelasan tata kelola juga mencakup hubungan saling percaya diantara para *stakeholders*. Dalam rasa saling percaya tersebut termasuk diantaranya aturan yang disepakati bersama dari tiap pemangku kepentingan, serta kebebasan dalam menentukan bagaimana kolaborasi akan dilaksanakan dan siapa saja yang diperbolehkan untuk melaksanakannya. Dalam hal ini, tata kelola pemerintah kolaboratif dikatakan berhasil apabila terdapat kejelasan siapa yang menjadi anggota dan berhak untuk menjalankan dan siapa yang bukan anggota sehingga tidak berhak untuk menjalankan suatu jaringan.

5. *Access to Authority* (Akses terhadap kekuasaan)

Access to authority merupakan ketersediaan standar-standar atau ukuran ketentuan prosedur-prosedur yang jelas dan diterima secara luas. Sehingga, harus ada aturan kewenangan yang jelas dan diterima oleh para pemangku kepentingan dalam menjalankan peran sesuai kewenangannya.

6. *Distributive Accountability/Responsibility* (Pembagian akuntabilitas/responsibilitas)

Pembagian akuntabilitas maupun responsibilitas merupakan pembagian tanggung jawab dalam tata kelola penataan, pengelolaan, manajemen secara bersama-sama dengan para aktor selaku pemangku kepentingan dan berbagi kegiatan pengambilan keputusan serta tanggung jawab guna mencapai hasil yang diinginkan. Sehingga, dalam tata kelola pemerintah kolaboratif harus ada pembagian tanggung jawab yang jelas pada masing-masing pemangku kepentingan, dan setiap masing-

masing pemangku kepentingan termasuk masyarakat harus terlibat dalam pembuatan hingga pengambilan keputusan kebijakan.

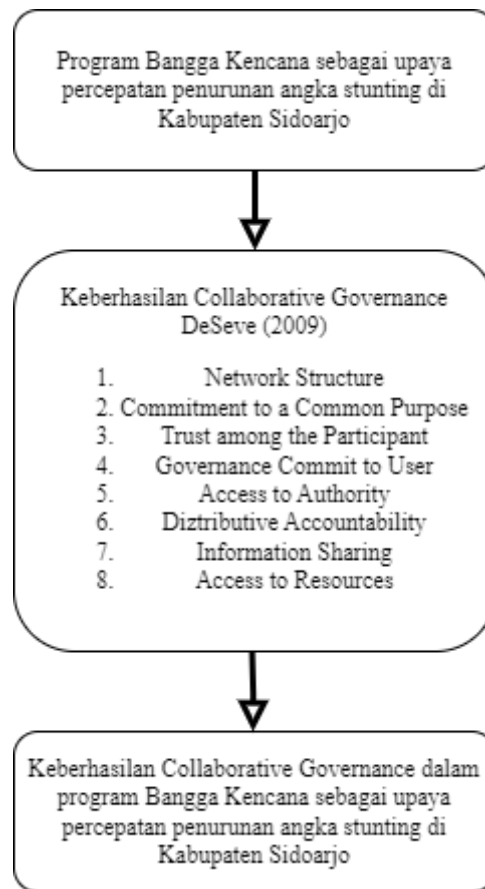
7. *Information Sharing* (Berbagi informasi)

Berbagi informasi merupakan kemudahan akses bagi para anggota berupa perlindungan privasi mengenai kerahasiaan identitas pribadi seseorang dan pembatasan akses bagi yang bukan anggota. Sehingga, dalam pemerintahan kolaboratif harus ada pembagian informasi yang jelas dan kemudahan akses mencakup sistem, *software*, dan prosedur yang mudah dan aman yang dapat diakses oleh seluruh *stakeholders*.

8. *Access to Resources* (Akses terhadap sumber daya)

Access to resources merupakan ketersediaan terhadap sumber keuangan, teknis, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan sebuah jaringan. Jadi, harus ada ketersediaan dan kejelasan sumber daya yang dapat diakses oleh seluruh *stakeholder* terkait.

2.3 Kerangka Konseptual



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

Sumber: Gambar dikelola oleh penulis

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Walidin, Saifullah & Tabrani (2015) penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terperinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah (Fadli, 2021). Tujuan penelitian kualitatif menurut Kriyantono dalam Ulfa (2018) adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. Peneliti memilih untuk menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif karena peneliti hendak mendeskripsikan dan menganalisis implementasi *collaborative governance* dalam program Bangga Kencana sebagai upaya percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, dengan memilih penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif peneliti dapat lebih leluasa dalam menjabarkan dan mengeksplor situasi sosial termasuk faktor pendukung dan penghambat pada implementasi *collaborative governance* dalam program Bangga Kencana secara menyeluruh dan mendalam.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian sangat diperlukan dalam suatu penelitian. Fokus penelitian bertujuan agar data penelitian tidak meluas. Dalam penelitian kualitatif, terdapat batas kajian penelitian yang ditentukan oleh fokus penelitian. Batas kajian dibuat untuk memudahkan peneliti dalam menentukan data yang terkait dengan tema penelitian.

Fokus penelitian ini ada pada bagaimana implementasi *collaborative governance* dalam program Bangga Kencana sebagai upaya percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Sidoarjo serta apa saja faktor pendukung dan penghambat pada implementasi *Collaborative Governance* yang melibatkan beberapa *stakeholder* dalam proses pelaksanaan program tersebut. Penelitian ini ingin mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana implementasi serta apa saja faktor pendukung dan penghambat pada kolaborasi yang dilakukan dalam program tersebut. Guna memudahkan proses analisis hasil penelitian, peneliti memfokuskan pada 8 (delapan) indikator keberhasilan *collaborative governance* menurut G. Edward DeSeve, yang diantaranya meliputi:

1. *Networked Structure* (Struktur Jaringan)

Menjelaskan mengenai keterkaitan antar *stakeholders* (meliputi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo, PKK Sidoarjo, dan PT. Angkasa Pura I Surabaya) yang menyatu dalam proses pelaksanaan program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo yang melibatkan adanya kegiatan saling bertukar ide/gagasan hingga saling berbagi sumber daya guna mencapai kesepakatan bersama.

2. *Commitment to a Common Purpose* (Komitmen terhadap tujuan)
Menjelaskan mengenai adanya komitmen antar *stakeholders* dalam proses pelaksanaan program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo yang dapat dipertanggungjawabkan melalui visi dan misi tujuan bersama.
3. *Trust among the Participants* (Kepercayaan antar stakeholder)
Menjelaskan mengenai hubungan profesionalitas antar *stakeholders* yang tergabung atau berkolaborasi dalam proses pelaksanaan program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo yang meliputi rasa saling percaya guna tercapai target penurunan angka stunting di Kabupaten Sidoarjo.
4. *Governance Commit to User* (Kejelasan dalam tata kelola)
Menjelaskan mengenai bagaimana kolaborasi dalam program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo akan dilaksanakan, meliputi siapa saja yang menjadi sasaran dari program Bangga Kencana, siapa saja anggota yang turut berkolaborasi dan berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kolaborasi program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo.
5. *Access to Authority* (Akses terhadap kekuasaan)
Menjelaskan mengenai ketersediaan prosedur-prosedur maupun ketentuan yang jelas, mengikat, dan dapat diterima oleh setiap lembaga yang berkolaborasi dalam program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo.
6. *Distributive Accountability / Responsibility* (Pembagian akuntabilitas / responsibilitas)
Menjelaskan mengenai pengelolaan/penataan serta pembagian tugas dan tanggungjawab tiap lembaga yang tergabung dalam kolaborasi program Bangga Kencana di Sidoarjo dalam rangka mencapai target penurunan angka stunting di Kabupaten Sidoarjo.
7. *Information Sharing* (Berbagi informasi)
Menjelaskan mengenai penyebaran informasi dan kemudahan akses yang jelas mencakup sistem dan prosedur yang mudah dan aman terkait program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo bagi pihak yang terlibat dalam kolaborasi program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo.

8. *Access to Resources* (Akses terhadap Sumber Daya)

Menjelaskan mengenai ketersediaan dan kejelasan sumber daya yang dapat diakses oleh seluruh *stakeholders* yang tergabung dalam kolaborasi program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilaksanakan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan penelitian telah ditetapkan sehingga mempermudah peneliti dalam melaksanakan penelitian. Penetapan lokasi penelitian membantu menangkap fenomena atau situasi sosial yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Lokasi yang diambil ditentukan dengan sengaja. Lokasi penelitian dapat ditentukan pada sebuah wilayah tertentu atau suatu lembaga tertentu dalam masyarakat. Untuk memperoleh data primer dan data sekunder penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo pada bulan April 2024. Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang tercatat memiliki prevalensi stunting yang tinggi, oleh sebab itu kabupaten Sidoarjo termasuk salah satu daerah yang menjalankan program Bangga Kencana sebagai upaya percepatan penurunan angka stunting. Dalam pelaksanaan program Bangga Kencana, Kabupaten Sidoarjo tidak bekerja sendirian melainkan berkolaborasi dengan berbagai pihak diantaranya sektor pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Berdasarkan pra observasi, kolaborasi antar aktor dalam program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo telah berjalan dengan cukup baik di beberapa kecamatan. Peneliti ingin lanjut melakukan penelitian mengenai implementasi kolaborasi serta faktor pendukung dan penghambat dalam Program Bangga Kencana agar nantinya pelaksanaan kolaborasi dalam program ini dapat lebih menjangkau ke seluruh daerah di Kabupaten Sidoarjo dan percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Sidoarjo dapat direalisasikan dengan baik.

3.4 Sumber Data

Data merupakan sekumpulan informasi dan keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau pencarian ke sumber-sumber tertentu. Pada penelitian kualitatif segala kegiatan dilakukan dengan sadar, terarah, dan senantiasa bertujuan untuk memperoleh suatu informasi yang diperlukan.

Terdapat dua jenis data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan dari narasumber atau informan melalui observasi dan wawancara. Adapun narasumber atau informan pada penelitian ini diantaranya :

- a. Kasi Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo

- b. Kasi Advokasi & KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) DP3AKB Kabupaten Sidoarjo
- c. Koordinator program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo
- d. Koordinator CSR PT. Angkasa Pura I Surabaya
- e. Koordinator Pokja IV TP PKK Kabupaten Sidoarjo
- f. Ibu dengan anak penderita stunting di Kabupaten Sidoarjo

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan yang tidak didapat secara langsung di lapangan, melainkan dari sumber yang sudah dibuat oleh orang lain seperti buku, dokumen, foto, dan statistik. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), dokumen antar sektor terkait, jurnal ilmiah, dan sumber data elektronik lain.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama sebuah penelitian ialah untuk mendapatkan data (Sugiono, 2016: Hal 224). Pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan dari narasumber guna mendukung penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini selanjutnya diuraikan sebagai berikut.

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan percakapan tujuannya untuk mencari informasi, baik dari narasumber atau informan. Sugiyono (2011) menyatakan bahwa wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab (Waris, 2022). Sebelum melakukan wawancara kepada narasumber atau informan, peneliti membuat pedoman wawancara yang memuat pertanyaan-pertanyaan penting yang akan ditanyakan kepada narasumber guna mempermudah jalannya wawancara terkait penelitian. Meskipun, saat prosesnya sewaktu-waktu pertanyaan yang diajukan dapat berkembang sesuai situasi dan kondisi yang terjadi. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan informasi melalui informan atau narasumber wawancara yakni beberapa *stakeholder* yang berkolaborasi dalam program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo.

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data kualitatif dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan atau lingkungan penelitian. Observasi atau pengamatan dilakukan menggunakan mata secara langsung tanpa perantara apapun. Peneliti mengamati dan mencatat kondisi langsung lapangan dan objek penelitian sesuai dengan kebutuhan penelitian. Peneliti akan melakukan observasi terhadap beberapa

stakeholder yang berkolaborasi dalam program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo.

3. Dokumentasi

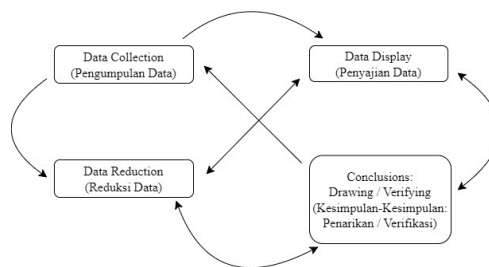
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk gambar, tulisan atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2016: Hal 240). Dokumentasi pada penelitian ini berupa data yang didapat melalui dokumen hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), publikasi dari media yang meliput tentang kolaborasi pemerintah dalam program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo, jurnal ilmiah, dan dokumen antar sektor terkait yang sedang berkolaborasi.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan metode atau cara untuk memproses suatu data menjadi informasi sehingga data tersebut menjadi mudah di pahami dan bermanfaat dalam suatu penelitian. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan menggambarkan kalimat dan kata yang sesuai dengan data yang diperoleh oleh peneliti di lapangan.

Menurut Bogdan dalam Sugiono (2007:427) analisis data merupakan proses menemukan dan menyusun secara sistematis data yang ditemukan dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan materi lain sehingga dapat mudah dipahami dan diinformasikan kepada orang lain (Ahmad, 2018).

Penelitian ini menggunakan model dari Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman (1992:20), teknik analisis data penelitian kualitatif melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan / verifikasi kesimpulan (Ahmad, 2018).



Gambar 3.1 Model Analisis Data Miles dan Huberman

Sumber: Gambar dikelola oleh penulis

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Pengumpulan data penelitian di lapangan dilakukan oleh peneliti menggunakan metode yang telah ditentukan. Pada penelitian kualitatif, pengumpulan data biasa didapat melalui wawancara, observasi, maupun teknik dokumentasi. Dalam hal ini, peneliti

melakukan wawancara sekaligus observasi secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan kolaborasi program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan upaya menyimpulkan data, kemudian memilah-milah data dalam satuan konsep, kategori, dan tema penelitian yang dilakukan. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan peneliti ke dalam bentuk sketsa, sinopsis, matriks, dan bentuk lainnya guna memudahkan pemaparan dan penegasan kesimpulan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus dan prosesnya tidak sekali selama penelitian berlangsung atau selama pengumpulan data. Dalam hal ini, peneliti memilah data yang relevan dengan fokus penelitian yakni mengenai kolaborasi dalam program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo dari banyaknya data kasar yang peneliti dapatkan melalui proses pengumpulan data.

3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahap lanjut dari reduksi data. Penyajian data merupakan kegiatan ketika sekumpulan informasi penelitian yang telah disusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif beragam bentuknya diantaranya dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, grafik, diagram, pictogram, dan lain-lain. Penyajian data ditujukan untuk memudahkan melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat maupun sebaliknya, dan yang terpenting ialah data yang telah dikumpulkan dan dipilah dapat tersampaikan dengan baik kepada orang lain. Dalam hal ini, peneliti menyajikan data yang sudah direduksi sebelumnya yakni hanya data-data yang relevan dengan fokus penelitian mengenai kolaborasi dalam program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo.

4. Penarikan / Verifikasi Kesimpulan

Langkah terakhir dalam menganalisis penelitian kualitatif adalah penarikan / verifikasi kesimpulan. Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, peneliti mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Kesimpulan yang belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci. Penarikan kesimpulan dilakukan oleh peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Penarikan kesimpulan merupakan hasil analisis yang digunakan untuk mengambil tindakan. Dalam hal ini, peneliti menyusun kesimpulan dari hasil penelitian mengenai kolaborasi pemerintah dalam program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo serinci mungkin. Sehingga, peneliti dan pembaca dapat memiliki kesepahaman yang sama dari penelitian yang peneliti lakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, R. (2018). *Analisis Data Kualitatif. Jurnal Alhadharah UIN Antasari Banjarmasin*, Vol 17 No.33 Januari-Juni 2018. <file:///C:/Users/Windows%2010%20Altum/Downloads/2374-6594-1-SM.pdf>. 17(33), 81–95.
- Andani, A. T. V., Setyowati, E., & Amin, F. (2019). Implementasi Program Pelayanan One Day Service dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Badan Pertanahan Nasional Kota. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 5(3), 328–336. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2019.005.03.9>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Botero-Tovar, N., Arocha Zuluaga, G. P., & Ramírez Varela, A. (2020). Factors influencing delivery of intersectoral actions to address infant stunting in Bogotá, Colombia - A mixed methods case study. *BMC Public Health*, 20(1), 1–12. <https://doi.org/10.1186/s12889-020-09057-x>
- Efiyanti, E., Indarti, S., & Warlina, L. (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Promosi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan Dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Melalui Media Online Terhadap Pengetahuan Remaja Di Kota Banda Aceh. *TheJournalish: Social and Government*, 3(2), 150–159. <https://doi.org/10.55314/tsg.v3i2.271>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Febri Yuliani. (2019). *Kinerja Kantor Perwakilan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (Bkkbn) Provinsi Riau Dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan Dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)*. 8, 1–16.
- Febriana, N., & Hertati, D. (2023). Penanggulangan Stunting dalam Prespektif Collaborative. *PUBLIC POLICY: (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis)*, 4(2), 625–644.
- Himah, I. A., Studi, P., Negara, A., Ilmu, F., Dan, S., & Politik, I. (2023). *COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PROGRAM ANGKUTAN SISWA DISABILITAS DALAM UPAYA*.
- Ipan, Purnamasari, H., & Priyanti, E. (2021). Collaborative Governance dalam Penanganan Stunting. *Kinerja*, 18(3), 383–391.
- Jenifer Sokoy, F. S., Kabupaten Jayapura, A., & Papua Program studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, P. (n.d.). *Implementasi Program Pembangunan Keluarga Kependudukan Dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Dalam Proses Percepatan Penurunan Angka Stunting Di Kabupaten Jayapura*.
- Kogoya, M., Posumah, J. H., & Kolondam, H. (2021). Pelaksanaan program pengentasan kemiskinan masyarakat di desa jirene kecamatan nogy kabupaten lanny-jaya. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(99), 81–91.

- Liputan6.com. (2022). *Bupati Ahmad Mudhlor Ungkap Penyebab Kasus Stunting di Sidoarjo*. <https://www.liputan6.com/jatim/read/4907832/bupati-ahmad-mudhlor-ungkap-penyebab-kasus-stunting-di-sidoarjo>
- Marwiyah, S., Devi, N. U. K., & Jailani, M. (2022). Implementasi Program Welijo Peduli Stunting Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kerja Puskesmas Tongas (Studi Pada Desa Sumendi Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo). *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(3), 10374–10379. <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i3.3410>
- Mediani, H. S., Nurhidayah, I., & Lukman, M. (2020). Pemberdayaan Kader Kesehatan tentang Pencegahan Stunting pada Balita. *Media Karya Kesehatan*, 3(1), 82–90. <https://doi.org/10.24198/mkk.v3i1.26415>
- Muklis, A., Hidayat, M. T., & Nariyah, H. (2022). Collaborative Governance Pentahelix dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) di Kabupaten Cirebon. *Ijd-Demos*, 4(1), 253–264. <https://doi.org/10.37950/ijd.v4i1.202>
- PKK Kabupaten Sidoarjo. (2022). *Sosialisasi Program Bangga Kencana Oleh Pokja IV TP PKK Kabupaten Sidoarjo*. <https://pkk.sidoarjo.kab.go.id/sosialisasi-program-bangga-kencana-oleh-pokja-iv-tp-pkk-kabupaten-sidoarjo>
- Publik, D. A., Diponegoro, U., Publik, D. A., & Diponegoro, U. (2022). *Mahasiswa Prodi S1 Administrasi Publik, Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro Dosen Prodi S1 Administrasi Publik, Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro*. 1(1), 1–13.
- Pujiastuti, N., Kundarti, F. I., & Ain, H. (2022). Kader Posyandu Sebagai Tenaga Pojok Gizi Desa Dalam Upaya Meningkatkan Asi Eksklusif Dan Menurunkan Stunting. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(3), 2104. <https://doi.org/10.31764/jmm.v6i3.8170>
- Putri, F. F., & Sukmana, H. (2022). Strategi Pemerintah Desa dalam Pencegahan Stunting di Desa Kedungkendo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 10(2), 224–235. <https://doi.org/10.30656/sawala.v10i2.5168>
- Qoyimah, D., Wardana, M. R., Susi, N., Nooresa, A. F., Muttaqin, M. I., & Wijaya, S. R. (2023). Collaborative Governance: Model Pengawasan Partisipatif Berbasis Gerakan Perempuan Mengawasi [Collaborative Governance: A Model of Participatory Surveillance Based on The Gerakan Perempuan Mengawasi]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 13(2), 182–202. <https://doi.org/10.22212/jp.v13i2.3317>
- Radarsidoarjo.co.id. (2022). *Kolaborasi Penurunan Stunting Sidoarjo Untuk Capai Target Di Bawah 14 Persen*. <https://radarsidoarjo.jawapos.com/kota-delta/85934136/kolaborasi-penurunan-stunting-sidoarjo-untuk-capai-target-di-bawah-14-persen>
- Rueda-Guevara, P., Botero-Tovar, N., Trujillo, K. M., & Ramírez, A. (2021). Worldwide evidence about infant stunting from a public health perspective: a systematic review. *Biomedica*, 41(4), 1–38. <https://doi.org/10.7705/biomedica.6017>
- Shauma, Udzu Nabila & Purbaningrum, D. G. (2022). Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Stunting. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(2), 97–104.

- TV One News. (2023). *Kolaborasi BKKBN dan Pemkab Sidoarjo, Wabup Optimis Stunting Turun 14 Persen Tahun 2024*. <https://www.tvonenews.com/daerah/jatim/127750-kolaborasi-bkkbn-dan-pemkab-sidoarjo-wabup-optimis-stunting-turun-14-persen-tahun-2024>
- Utami, N. A. T., & Alawiya, N. (2021). *PERAN BADAN KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) DALAM MEWUJUDKAN PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA "BANGGA KENCANA" (Studi di BKKBN Provinsi Jawa Tengah)*. Vol. 10, N.
- Vangen, S., & Huxham, C. (2003). Nurturing Collaborative Relations: Building Trust in Interorganizational Collaboration. *The Journal of Applied Behavioral Science*, 39(1), 5–31. <https://doi.org/10.1177/0021886303039001001>
- Waris, et. al. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rake Sarasin* (Nomor Maret). <https://scholar.google.com/citations?user=OB3eJYAAAAJ&hl=en>
- Wartagres. (2023). *Fokus Penurunan Stunting, Pemkab Sidoarjo Gelar Progam Konsolidasi Bangga Kencana*. <https://wartagres.com/2023/06/07/fokus-penurunan-stunting-pemkab-sidoarjo-gelar-progam-konsolidasi-bangga-kencana/>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo

1. *Networked Structure* (Struktur Jaringan)
 - a. Bagaimana kolaborasi antara Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo?
 - b. Bagaimana kolaborasi antara Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo dalam program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo?
 - c. Bagaimana kolaborasi antara Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dengan swasta dalam program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo?
 - d. Bagaimana kolaborasi antara Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dengan TP PKK Kabupaten Sidoarjo dalam program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo?
 - e. Bagaimana kolaborasi antara Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dengan Puskesmas di tingkat kecamatan dalam program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo?
2. *Commitment to a Common Purpose* (Komitmen terhadap tujuan)
 - a. Apa yang menjadi visi dan misi tujuan bersama dalam program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo?
3. *Trust among the Participants* (Kepercayaan antar stakeholder)
 - a. Bagaimana bentuk kepercayaan yang diberikan oleh seluruh pihak yang tergabung dalam program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo?
4. *Governance Commit to User* (Kejelasan dalam tata kelola)
 - a. Siapa saja yang menjadi sasaran dari program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo?
 - b. Siapa saja pihak yang turut berpartisipasi dalam suksesi program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo?
 - c. Bagaimana manajemen pengelolaan pelaksanaan program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo?
5. *Access to Authority* (Akses terhadap kekuasaan)
 - a. Bagaimana pembagian wewenang antar seluruh pihak terkait dalam program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo?
6. *Distributive Accountability / Responsibility* (Pembagian akuntabilitas / responsibilitas)
 - a. Bagaimana bentuk pembagian tanggungjawab antar seluruh pihak dalam program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo?

7. *Information Sharing* (Berbagi informasi)
 - a. Siapa saja yang dapat mengakses informasi seputar program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo?
 - b. Bagaimana manajemen penyebaran informasi dan komunikasi dalam program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo?
8. *Access to Resources* (Akses terhadap Sumber Daya)
 - a. Bagaimana pembagian peran antar pihak yang saling terlibat dalam program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo?
 - b. Bagaimana akses sumber daya pada program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo?

Kepala Divisi Advokasi & KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) DP3AKB Kabupaten Sidoarjo

1. *Networked Structure* (Struktur Jaringan)
 - a. Bagaimana kolaborasi antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo?
 - b. Bagaimana kolaborasi antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo dengan TP PKK Kabupaten Sidoarjo dalam program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo?
2. *Commitment to a Common Purpose* (Komitmen terhadap tujuan)
 - a. Apa yang menjadi visi dan misi tujuan bersama dalam program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo?
3. *Trust among the Participants* (Kepercayaan antar stakeholder)
 - a. Bagaimana bentuk kepercayaan yang diberikan oleh seluruh pihak yang tergabung dalam program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo?
 - b. Bagaimana komitmen para stakeholders yang tergabung dalam suksesi program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo?
4. *Governance Commit to User* (Kejelasan dalam tata kelola)
 - a. Siapa saja yang menjadi sasaran dari program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo?
 - b. Siapa saja pihak yang turut berpartisipasi dalam suksesi program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo?
 - c. Bagaimana manajemen pengelolaan pelaksanaan program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo?
5. *Access to Authority* (Akses terhadap kekuasaan)
 - a. Bagaimana pembagian wewenang antar seluruh pihak terkait dalam program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo?

6. *Distributive Accountability / Responsibility* (Pembagian akuntabilitas / responsibilitas)
 - a. Bagaimana bentuk pembagian tanggungjawab antar seluruh pihak dalam program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo?
 - b. Apakah pembagian tanggungjawab pada program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo sudah sesuai dengan wewenang tiap stakeholder yang terlibat?
7. *Information Sharing* (Berbagi informasi)
 - a. Siapa saja yang dapat mengakses informasi seputar program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo?
 - b. Bagaimana manajemen penyebaran informasi dan komunikasi dalam program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo?
8. *Access to Resources* (Akses terhadap Sumber Daya)
 - a. Bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo memberikan peran keterlibatan dalam program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo?

Koordinator CSR PT. Angkasa Pura 1 Juanda Sidoarjo

1. *Networked Structure* (Struktur Jaringan)
 - a. Bagaimana kolaborasi antara PT. Angkasa Pura 1 Juanda Sidoarjo dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam suksesi program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo?
2. *Commitment to a Common Purpose* (Komitmen terhadap tujuan)
 - a. Apa yang menjadi visi dan misi tujuan bersama dalam program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo?
3. *Trust among the Participants* (Kepercayaan antar stakeholder)
 - a. Bagaimana komitmen para stakeholders yang tergabung dalam suksesi program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo?
4. *Governance Commit to User* (Kejelasan dalam tata kelola)
 - a. Siapa saja yang menjadi sasaran dari program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo?
 - b. Siapa saja pihak yang turut berpartisipasi dalam suksesi program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo?
 - c. Bagaimana manajemen pengelolaan pelaksanaan program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo?
5. *Access to Authority* (Akses terhadap kekuasaan)
 - a. Bagaimana pembagian wewenang antar seluruh pihak terkait dalam program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo?
6. *Distributive Accountability / Responsibility* (Pembagian akuntabilitas / responsibilitas)
 - a. Bagaimana bentuk pembagian tanggungjawab antar seluruh pihak dalam program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo?

- b. Apakah pembagian tanggungjawab pada program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo sudah sesuai dengan wewenang tiap stakeholder yang terlibat?
- 7. *Information Sharing* (Berbagi informasi)
 - a. Bagaimana kemudahan akses informasi yang anda peroleh terkait program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo?
 - b. Informasi apa saja yang anda peroleh dari program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo?
- 8. *Access to Resources* (Akses terhadap Sumber Daya)
 - a. Apakah PT. Angkasa Pura 1 Juanda Sidoarjo mendukung penuh program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo?
 - b. Bagaimana bentuk dukungan yang diberikan oleh PT. Angkasa Pura 1 Juanda Sidoarjo dalam suksesi program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo?

Koordinator Pokja IV TP PKK Kabupaten Sidoarjo

- 1. *Networked Structure* (Stuktur Jaringan)
 - a. Bagaimana kolaborasi antara Pokja IV TP PKK Kabupaten Sidoarjo dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam suksesi program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo?
- 2. *Commitment to a Common Purpose* (Komitmen terhadap tujuan)
 - a. Apa yang menjadi visi dan misi tujuan bersama dalam program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo?
- 3. *Trust among the Participants* (Kepercayaan antar stakeholder)
 - a. Bagaimana komitmen para stakeholders yang tergabung dalam suksesi program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo?
- 4. *Governance Commit to User* (Kejelasan dalam tata kelola)
 - a. Siapa saja yang menjadi sasaran dari program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo?
 - b. Siapa saja pihak yang turut berpartisipasi dalam suksesi program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo?
 - c. Bagaimana manajemen pengelolaan pelaksanaan program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo?
- 5. *Access to Authority* (Akses terhadap kekuasaan)
 - a. Bagaimana pembagian wewenang antar seluruh pihak terkait dalam program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo?
- 6. *Distributive Accountability / Responsibility* (Pembagian akuntabilitas / responsibilitas)
 - a. Bagaimana bentuk pembagian tanggungjawab antar seluruh pihak dalam program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo?
 - b. Apakah pembagian tanggungjawab pada program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo sudah sesuai dengan wewenang tiap stakeholder yang terlibat?

7. *Information Sharing* (Berbagi informasi)
 - a. Bagaimana kemudahan akses informasi yang anda peroleh terkait program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo?
 - b. Informasi apa saja yang anda peroleh dari program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo?
8. *Access to Resources* (Akses terhadap Sumber Daya)
 - a. Apakah Pokja IV TP PKK Kabupaten Sidoarjo mendukung penuh program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo?
 - b. Bagaimana bentuk dukungan yang diberikan oleh Pokja IV TP PKK Kabupaten Sidoarjo dalam suksesi program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo?

Ibu dengan anak penderita stunting di Kabupaten Sidoarjo

1. *Networked Structure* (Stuktur Jaringan)
 - a. Apakah ibu/saudara mengetahui perihal program Bangga Kencana yang merupakan program gabungan dari pemerintah?
2. *Commitment to a Common Purpose* (Komitmen terhadap tujuan)
 - a. Apakah menurut ibu/saudara kolaborasi pemerintah dalam program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo sudah tepat sasaran?
3. *Trust among the Participants* (Kepercayaan antar stakeholder)
 - a. Apakah ibu/saudara merasakan dampak dari adanya program Bangga Kencana?
4. *Governance Commit to User* (Kejelasan dalam tata kelola)
 - a. Berdasarkan yang ibu/saudara ketahui, bagaimana pemerintah melaksanakan program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo?
5. *Access to Authority* (Akses terhadap kekuasaan)
 - a. Berdasarkan yang ibu/saudara ketahui, apakah ada persyaratan tersendiri untuk ibu/saudara dapat mengakses atau terlibat dalam pelaksanaan program Bangga Kencana?
6. *Distributive Accountability / Responsibility* (Pembagian akuntabilitas / responsibilitas)
 - a. Adakah bantuan yang diterima oleh ibu/saudara dari pihak setempat yang berkenaan dengan program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo?
7. *Information Sharing* (Berbagi informasi)
 - a. Bagaimana ibu/saudara mendapatkan informasi mengenai program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo?
 - b. Informasi apa saja yang ibu/saudara peroleh terkait program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo?
8. *Access to Resources* (Akses terhadap Sumber Daya)
 - a. Apakah ibu/saudara mendapat kemudahan akses atas hal-hal yang berkenaan dengan program Bangga Kencana?
 - b. Bagaimana pihak setempat memberikan akses kepada ibu/saudara sebagai sasaran program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo?

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi : ♦ Administrasi Publik ♦ Administrasi Bisnis ♦ Ilmu Komunikasi
♦ Magister Administrasi Publik ♦ Magister Ilmu Komunikasi ♦ Doktor Ilmu Administrasi
Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)
Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fisip@untag-sby.ac.id

Surabaya, 29 April 2024

Nomor : 1194/K/FISIP/IV/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas Proposal
Perihal : Permohonan Ijin Observasi

Kepada Yth. : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo
Jl. Mayjen Sungkono No.46, Pucang, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo

Dengan hormat.

Sehubungan dengan pemenuhan data sebagai syarat menyelesaikan mata kuliah Skripsi pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan observasi dan wawancara.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:

| No. | Nama dan NIM | Alamat | No. Tlp |
|-----|--|---|--------------|
| 1. | NADILA RIZKI TRI RACHMAWATI (1112000060) | Jl. Dr. Soetomo III No. 6A RT. 004 RW. 002 Kel. Magersari, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo | 089508007911 |

Guna melakukan pengambilan data di:

“Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo”

Dengan Judul Skripsi: **“Implementasi Collaborative Governance dalam Program Bangga Kencana sebagai Upaya Percepatan Penurunan Angka Stunting di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur”.**

Demikian permohonan kami, atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Dekan,

Dr. Dra. Ayun Maduwinarti, M.P
NPP 20120.87.0103



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi : ♦ Administrasi Publik ♦ Administrasi Bisnis ♦ Ilmu Komunikasi
♦ Magister Administrasi Publik ♦ Magister Ilmu Komunikasi ♦ Doktor Ilmu Administrasi
Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)
Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fisip@untag-sby.ac.id

Surabaya, 29 April 2024

Nomor : 1195/K/FISIP/IV/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas Proposal
Perihal : Permohonan Ijin Observasi

Kepada Yth. : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo
Jl. Pahlawan IX No.173 B, Kwadengan Barat, Lemahputro,
Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo

Dengan hormat.

Sehubungan dengan pemenuhan data sebagai syarat menyelesaikan mata kuliah Skripsi pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan observasi dan wawancara.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:

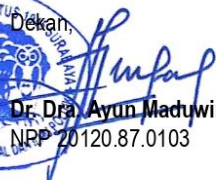
| No. | Nama dan NIM | Alamat | No. Tlp |
|-----|---|--|--------------|
| 1. | NADILA RIZKI TRI RACHMAWATI (1112000060) | Jl. Dr. Soetomo III No. 6A RT. 004 RW. 002 Kel. Magersari, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo | 089508007911 |

Guna melakukan pengambilan data di:

“Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo”

Dengan Judul Skripsi: **“Implementasi Collaborative Governance dalam Program Bangga Kencana sebagai Upaya Percepatan Penurunan Angka Stunting di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur”.**

Demikian permohonan kami, atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Dekan,

Dr. Dra. Ayun Maduwinarti, M.P.
NRP 20120.87.0103



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi : ♦ Administrasi Publik ♦ Administrasi Bisnis ♦ Ilmu Komunikasi
♦ Magister Administrasi Publik ♦ Magister Ilmu Komunikasi ♦ Doktor Ilmu Administrasi
Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)
Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fisip@untag-sby.ac.id

Surabaya, 29 April 2024

Nomor : 1196/K/FISIP/IV/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas Proposal
Perihal : Permohonan Ijin Observasi

Kepada Yth. : Ketua TP PKK Kabupaten Sidoarjo
Jalan Cokronegoro No.1, Kabupaten Sidoarjo

Dengan hormat.

Sehubungan dengan pemenuhan data sebagai syarat menyelesaikan mata kuliah Skripsi pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan observasi dan wawancara.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:


| No. | Nama dan NIM | Alamat | No. Tlp |
|-----|---|--|--------------|
| 1. | NADILA RIZKI TRI RACHMAWATI (1112000060) | Jl. Dr. Soetomo III No. 6A RT. 004 RW. 002 Kel. Magersari, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo | 089508007911 |

Guna melakukan pengambilan data di:

“Sekretariat Tim Penggerak PKK Kabupaten Sidoarjo”

Dengan Judul Skripsi: **“Implementasi Collaborative Governance dalam Program Bangga Kencana sebagai Upaya Percepatan Penurunan Angka Stunting di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur”.**

Demikian permohonan kami, atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terima kasih.


Dekan,
Dr. Dra. Ayun Maduwinarti, M.P
NPP 20120.87.0103

Lampiran 3. Kartu Bimbingan Skripsi



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAS) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi : ♦ Administrasi Publik ♦ Administrasi Bisnis ♦ Ilmu Komunikasi
 ♦ Magister Administrasi Publik ♦ Magister Ilmu Komunikasi ♦ Doktor Ilmu Administrasi
 Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)
 Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fisip@untag-sby.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : NADILA RIZKI TRI RACHMAWATI

NBI : 1112000060

Program Studi : Administrasi Negara

Dosen Pembimbing I : Drs. Supri Hartono, M.S

Dosen Pembimbing II : Drs. Radjikan, M.Si

Judul Skripsi : Implementasi Collaborative Governance dalam Program Bangga Kencana sebagai Upaya Percepatan Penurunan Angka Stunting di Kabupaten Sidoarjo

| No | Tanggal | Saran/Perbaikan | Pembimbing | |
|----|---------|--|--------------------|--------------------|
| | | | Paraf Dospem 1 | Paraf Dospem 2 |
| 1 | 5/3 | Revisi 2 x 2 kuler, ke-1 & 2 | <i>[Signature]</i> | |
| 2 | 14/3 | Revisi I, II, III & IV | <i>[Signature]</i> | |
| 3 | 25/3 | - Penambahan keterangan lokasi pada judul - Penambahan uraian & perbedaan di tabel per- bandingan model implementasi - Urutan pada fokus penelitian | | <i>[Signature]</i> |
| 4 | 4/4 | Revisi ke-3 | <i>[Signature]</i> | |
| 5 | 23/4 | Revisi I - III & IV | | <i>[Signature]</i> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |